

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan Manusia dan masyarakat dilakukan melalui upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana. Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi serta pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan oleh pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dan transmigrasi, pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan perdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur seperti transportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan penduduk tumbuh seimbang, maka daya tampung dan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menjelaskan bahwa kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana diperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga harus dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan untuk menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain. Data dan Informasi Keluarga harus terinci dan terklasifikasi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 telah menetapkan, beberapa kebijakan seperti : meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pelayanan Keluarga Berencana untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran, Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui peningkatan KIE dan peran peer to peer group remaja dalam peningkatan pengetahuan

IV.C.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS melalui program Kesehatan remaja. Mewujudkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita, Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia . Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas melalui peningkatan peran serta masyarakat, pengelola program atau kader dan pengembangan jejaring kerja/kemitranan serta pengembangan informasi program kependudukan dan keluarga berencana.

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Badan Kependudukan, KBPP dan PA selaku *leading sector*. Sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka urusan ini tetap berada di bawah *leading sector* Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana , pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.798.671.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.848.035.899,00 atau 93,58% dari rencana. Sedangkan untuk Belanja Langsung Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.171.743.400 dan terealisasi sebesar Rp. **3.849.531.953** atau 92,27%. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.8.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016

No.	Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	BELANJA LANGSUNG	4.171.743.400	3.849.531.953	92,27
	URUSAN KELUARGA BERENCANA	4.171.743.400	3.849.531.953	92,27
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	446.325.000	438.726.251	98,29
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.389.000	353.711.682	98,14
3.	Program Keluarga Berencana	2.647.379.400	2.349.313.907	88,74
4.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	110.000.000	109.662.900	99,69
5.	Program Pemberdayaan Keluarga	607.700.000	598.117.213	98,42
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.626.878.000	9.998.503.946	
A.	Gaji dan Tunjangan	7.833.878.000	7.330.303.821	93,57
B	Tambahan Penghasilan PNS	2.793.000.000	2.668.200.125	95,53
	JUMLAH	14.798.671.400	13.848.035.899	

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Keluarga Berencana

Prioritas utama Program Keluarga Berencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta. Untuk meningkatkan jangkauan layanan KB pada Tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Layanan KB gratis untuk masyarakat miskin di Kecamatan Kepil, Kaliwiro, Kalikajar, Wonosobo dan Garung melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Pra KS dan KS 1).

Pengelolaan Data Program KB dilakukan untuk pengumpulan dan pengolahan data kependudukan (demografi), data PUS dan kesertaan ber KB dan data tahapan keluarga sejahtera baik secara manual maupun aplikasi. Pendataan ini dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, Dusun dan kelurahan/ desa. Harapannya data yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri sebagai dasar penyusunan perencanaan program pembangunan di masyarakat.

Refresh RR untuk petugas RR dilakukan dalam bentuk pertemuan yang diikuti oleh petugas RR dari petugas lapangan keluarga berencana dan mendatangkan narasumber yang berkompeten untuk merefres mengenai pelaporan pengendalian lapangan ditingkat Kecamatan, sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan cakupan pelaporan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan hasil program di lapangan yang sebelumnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan.

Untuk meningkatkan partisipasi kaum pria dalam KB dan KR dan meningkatkan pemahaman tentang KB bagi kaum pria, dilakukan kegiatan pertemuan/pembinaan, paparan materi/ceramah, testimoni pengalaman dari salah satu anggota peserta Kb vasektomi kelompok KB pria (Prio Utomo) pada bulan Mei dan Juli tahun 2016 berlokasi di 5 kelompok Prio Utoma yang ada di 5 Kecamatan yaitu desa Jonggolsari Leksono, Tempurejo Kalibawang, Ngadikusuman Selomerto, Karangasari Sapuran dan desa Pagerojo Kertek.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan dukungan masyarakat terhadap program KB, serta memotivasi para calon akseptor KB dilakukan beberapa kegiatan diantaranya : pameran pembangunan KB, kegiatan penggerakan sasaran calon akseptor, kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK), dan kegiatan kesatuan gerak PKK KB kesehatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pencanangan dan bakti sosial.

Dalam rangka memberikan penerangan kepada masyarakat tentang program KB dengan tujuan agar masyarakat memahami program KB dan PUS mau menjadi peserta KB, diadakan berbagai kegiatan yaitu : pembuatan leaflet, umbul-umbul KB, dan penyuluhan pemutaran film tentang pentingnya KB dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) yang dilaksanakan di 10 desa yang ada di 8 Kecamatan.

- Prosentase peserta KB aktif tahun 2016 sebanyak 134.651 akseptor atau 80,46 %

dari pasangan usia subur sebanyak 167.357 pasangan.

- Jumlah peserta KB Pria tahun 2016 adalah 3.133 orang dan Prosentasenya adalah 2,33 %.
- Penyediaan data mikro di desa/kelurahan sebesar 100 %, ini berarti bahwa di setiap desa/kelurahan sudah tersedia data mikro keluarga.
- Rasio PLKB dengan desa/kelurahan sebesar 4,02, ini berarti bahwa setiap PLKB mempunyai wilayah binaan lebih dari empat desa.
- Age specific fertility rate (ASFR 15-19 tahun) tahun 2016 tidak tersedia data dimaksud, ini disebabkan pada tahun 2016 tidak ada kegiatan survey demografi yang dilaksanakan oleh BPS atau lintas sector., tetapi hasil Susenas Tahun 2015 bahwa ASFR 15-19) tahun sebesar 65.

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, serta mengurangi perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja, diadakan beberapa kegiatan diantaranya : pembinaan PIK KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja), orientasi pengurus KRR, serta jambore PIK remaja. Kegiatan jambore PIK remaja diikuti oleh Kelompok Saka Kencana dan Kelompok PIK Remaja se kabupaten Wonosobo dan dilaksanakan dilapangan desa di Menjer kecamatan Garung pada bulan November 2016 dengan melakukan kegiatan pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan pola pendidikan luar ruangan dengan lomba-lomba, outbond, penyuluhan dan kegiatan sosial remaja didesa.

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

Untuk meningkatkan partisipasi atau jumlah peserta KB baru dan KB aktif diperlukan peralatan dan obat kontrasepsi yang memadai, namun alat atau obat kontrasepsi yang berasal dari BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah tahun 2016 belum mencukupi, oleh karena itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi implant yang merupakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan alat kontrasepsi atau obat pil KB yang merupakan jenis alat kontrasepsi pemakaian tiap hari (jangka pendek). Diharapkan dengan pengadaan alat kontrasepsi implant dan pil KB dapat melayani para peserta KB baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif secara lebih optimal.

4) Program Pemberdayaan Keluarga

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan membentuk keluarga yang mandiri dan sejahtera. Melalui program ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pelatihan dan pembinaan Panca Bina Keluarga bagi para kader guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam membina kelompok bina keluarga. Selanjutnya untuk meningkatkan peran PPKBD

IV.C.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

disediakan operasional PPKBD yang digunakan untuk melaksanakan pertemuan setiap bulan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan program KB dan KS. Sementara itu untuk kelancaran pemasaran produk anggota kelompok UPPKS yaitu dengan memperkuat organisasi pendukung kegiatan melalui AKU dan Posdaya yang ada di kabupaten Wonosobo. Untuk memantau dan mencatat perkembangan anak dalam pola asuh tumbuh kembang anak balita dilakukan melalui pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak) yang kemudian dibagikan melalui KA.UPT KB kecamatan dan diteruskan oleh penyuluh KB ke kelompok BKB di wilayah masing-masing.

c. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik, Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Wonosobo saling asih, asuh bergotong royong dan terdorong untuk maju. Untuk mengetahui capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2016 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.C.8.2
Capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Prevalensi peserta KB aktif (Σ peserta program KB aktif) / (Σ pasangan usia subur) x 100%	$134016/167357 \times 100 = 80,90\%$	$134651/167357 \times 100 = 80,46\%$
2	Tk.Prevalensi Kepesertaan KB Pria (Σ peserta program KB Pria) / (Σ Peserta Aktif) x 100%	$3341/134016 \times 100 = 2,49\%$	$3133/134651 \times 100 = 2,33\%$
3	Rasio Petugas Lapangan KB/penyuluhKB (PLKB/PKB) I setiap desa/kelurahan (Σ Jumlahdesa/kelurahan / (Σ Jumlah PLKB/PKB)	$265/68 \times 100 = 3,90\%$	$265/66 \times 100 = 4,02\%$

Sumber : Badan KKBPPPA, 2016

Berdasarkan table di atas prevalensi peserta KB aktif mengalami penurunan pada tahun 2016. Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 80,90 % menurun pada tahun 2016 menjadi 80,48 %. Dengan kata lain 0,42 % pasangan usia subur yang sedang ber KB berhenti menggunakan alat dan obat kontrasepsi, ini bisa karena ingin hamil, ingin anak segera, atau terjadi penambahan Pasangan Usia subur karena perkawinan baru. Capaian presentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2016

IV.C.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

tidak mengalami perubahan, karena pada tahun 2016 proses rekapitulasi hasil Pendataan keluarga belum selesai sehingga belum bisa menampilkan perkembangan tahapan keluarga sejahtera.

Selain berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana data di atas, capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera juga dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja berdasarkan RPJMD yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel IV.C.8.3
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Total fertility Rate (TFR)	2,13	2,13
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,55	0,50
3	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	8,81%	8,81%
4	CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif)	80,90	80,46
5	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%
6	Rasio petugas KB /desa	3,10	4,03
7	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 (Angka Kelahiran Menurut Golongan Umur)	95	65
8	Unmetneed	7,93	8,36
9	Cakupan kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera	45	30,01
10	Persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	41,08	41,02
11	Drop out KB	18,15	17,20
12	% Kebersertaan KB Pria	2,49	2,33
13	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	450	432
14	% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	87,33	87,36
15	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina	222	233
16	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina	15	6
17	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	16,9 tahun	16,9 tahun
18	Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	17	17
19	% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %	3,26	5,12

Sumber : Badan KKBPPPA, 2016

IV.C.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 tidak tersedia data, tetapi TFR kabupaten wonosobo tahun 2015 sebesar 2,13. Sedangkan prevalensi peserta KB Aktif tahun 2016 mengalami penurunan 0,44 % dari 80,90 % menjadi 80,46 % yang didukung dengan peserta KB Baru sebanyak 23.800 akseptor yang terdiri dari peserta KB baru murni dan peserta KB ganti cara.

Prosentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tidak mengalami perubahan, ini disebabkan karena pada tahun 2016 belum ada data jumlah keluarga Pra S dan KS 1 hasil pendataan keluarga, karena proses pengolahan hasil Pendataan keluarga atau Pengelolaan Data keluarga belum selesai sampai dengan akhir tahun 2016.

Menurut hasil Updating data keluarga tahun 2016 bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun di kabupaten Wonosobo masih sangat tinggi dan ini merupakan prosentase tertinggi di Jawa Tengah juga Age Specific Fertility Rate juga masih tergolong tinggi. Di lain sisi, tingkat partisipasi pria dalam ber KB jika dilihat dari data prosentase peserta KB baru pria, terlihat masih sangat rendah yaitu sebesar 2,33 % dan sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa prosentase peserta KB pria sangat rendah dibandingkan dengan peserta KB aktif wanita. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa KB merupakan urusan wanita saja, selain itu juga adanya kekhawatiran pria dalam kontrasepsi MOP dapat menurunkan libido.

Data terkait dengan metode kontrasepsi bagi peserta KB tersaji pada tabel berikut:

Tabel IV.C.8.4
Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2015-2016

No.	Metode Kontrasepsi	2015		2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	IUD	13.912	10,38	14.146	10,51
2	MOW	9.963	7,43	9.088	6,75
3	MOP	1.772	1,32	1.523	1,13
4	Kondom	1.569	1,17	1.610	1,20
5	Implant	29.405	21,91	30.483	22,64
6	Suntik	66.629	49,72	67.814	50,36
7	Pil	10.766	8,03	9.987	7,42
	Jumlah	134.016		134.651	

Sumber: Badan BKKBPPPA, 2016

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (*Unmetneed*) di kabupaten Wonosobo masih tinggi yaitu sekitar 8,36 %. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, akses terhadap layanan dan kualitas pelayanan. Sementara angka

IV.C.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

drop out KB juga cukup tinggi sebesar 17,20 % . Meskipun menurun dari tahun sebelumnya, tetapi masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak karena nilai ini masih tergolong tinggi.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi sebagaimana disebutkan di atas dapat diatasi salah satunya melalui pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) bagi seluruh masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS), selain juga berusaha meningkatkan partisipasi keluarga pra KS dan KS I untuk menjadi peserta KB, sehingga kebutuhan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB dapat terpenuhi, dan angka drop out tidak terlalu tinggi.

Terlepas dari beberapa permasalahan di atas, beberapa capaian tersebut mengindikasikan bahwa program dan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah mencapai sasarnya dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 di antaranya:

Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dapat dilakukan antara lain :

Tabel IV.C.8.5
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masih lemahnya dukungan dan komitmen para stake holder dalam program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga	Lebih meningkatkan promosi dalam menggerakkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana juga Keluarga Sejahtera di masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK, TNI, Polri, Muslimat dan Aisiyah, serta organisasi masyarakat lainnya
2.	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan Kependudukan dan keluarga berencana, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegratif.
3.	Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah, ini ditandai dengan Usia Kawin pertama perempuan masih tinggi	Peningkatan jumlah dan peran PIK KKR di setiap kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dalam upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama perempuan.

IV.C.8. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Permasalahan	Solusi
4.	Terbatasnya sarana/media dalam upaya mensosialisasikan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Perlunya subsidi biaya pelayanan untuk keluarga Prasejahtera dan sejahtera 1 dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi keluarga tersebut didalam ber KB.
5.	Belum merata Ketertarikan PUS akan KB MOW dan MOP disemua wilayah, hal ini disebabkan pemahaman masyarakat akan KB Mantap masih beragam	Melakukan pembinaan dan pendampingan serta memberikan pengetahuan kepada keluarga terutama pasangan usia subur baik yang sudah ber KB maupun yang belum.
6.	Masih rendahnya tingkat partisipasi kaum pria dalam ber-KB.	Mengoptimalkan peran aktif paguyuban "Priyo Utomo" dan lebih melakukan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB
7.	Usia kawin pertama perempuan masih rendah	Perlu dilaksanakan kampanye pendewasaan usia perkawinan.
8.	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak program di tingkat desa/rw maupun RT untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KKBPK	Optimalisasi kader yang ada di semua tingkatan wilayah dalam rangka kegiatan pemberdayaan keluarga